

**RELEVANSI SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN
(STUDI PUTUSAN 201/PID.SUS/2024/PN. BGL)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : PEP TRIANA
NPM : 2174201114
BAGIAN : HUKUM PIDANA
FAKULTAS : HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**RELEVANSI SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN DALAM
KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN
(STUDI PUTUSAN 201/PID.SUS/2024/PN. BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : PEP TRIANA
NPM : 2174201114
BAGIAN : HUKUM PIDANA
FAKULTAS : HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**RELEVANSI SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN DALAM
KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN (STUDI PUTUSAN
201/PID.SUS/2024/PN.BGL)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

PEP TRIANA
NPM. 2174201114

Dosen Pembimbing



Riri Tri Mayasari, S.M., M.H
NIDN. 0211048601

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

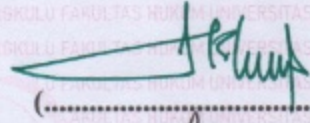
Hari : Kamis
Tanggal : 24 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

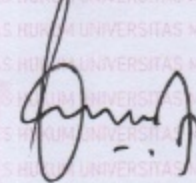
NAMA

TANDA TANGAN

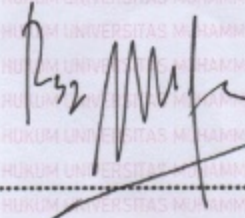
1. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Ketua Penguji)


(.....)

2. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)


(.....)

3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pep Triana
NPM : 2174201114
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Relevansi surat keterangan sah hasil hutan dalam kasus tindak pidana kehutanan (Studi Putusan 201/Pid.Sus/2024/PN Bgl)” merupakan hasil karya sendiri bukan dari plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 24 Juli 2025
Yang Menyatakan



Pep Triana
2174201114

MOTTO

- (1) “Segala pencapaian ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, yang doanya menjadi jalan terang dalam setiap langkahku”.
- (2) “Tanpa ridha orang tua, tiada artinya segala usaha. Kepada mereka, kupersembahkan setiap tetes perjuangan ini.”

“ Pep Triana”

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur yang tak terhingga, skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Allah SWT, sumber kekuatan, kesabaran, dan harapan dalam setiap langkah. Tanpa rahmat dan pertolongan-mu, aku bukan apa-apa. Segala puji hanya bagi-mu.
2. Orang tuaku tercinta mak dan bapak, terima kasih atas cinta yang tak pernah habis, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang tak terbalas oleh apapun di dunia ini. Kalian adalah alasan aku terus melangkah.
3. Untuk kakak-kakakku, Ade Siputri, Ela, Icundra, Elji Marjeni terimakasih atas dukungan , semangat, dan kehadiranmu dalam setiap masa sulit dan bahagia. Engkaulah pelindung kedua setelah orang tua.
4. Kepada dosen pembimbing saya, Ibu Riri Tri Mayasari, S.H.M.H., terima kasih telah memberikan arahan dan masukan serta motivasi terbaik dalam proses pengerjaan dan bimbingan skripsi saya.
5. Kepada teman-temanku seperjuangan Charina Agustin Evanda dan ella Maipita Sari yang telah menemani dari awal mahasiswa baru sampai saat bersama-sama mengerjakan skripsi ini.

ABSTRAK

RELEVANSI SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN (STUDI PUTUSAN 201/PID.SUS/2024/PN BGL)

**Oleh :
Pep Triana**

Penegakan hukum di bidang kehutanan merupakan upaya strategis untuk melindungi kelestarian hutan dan mencegah praktik illegal logging. Salah satu instrumen legalitas hasil hutan kayu adalah surat keterangan sah hasil hutan, yang wajib dimiliki setiap pihak yang mengangkut, menyimpan, atau memperdagangkan kayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi surat keterangan sah hasil hutan dalam tindak pidana kehutanan, khususnya pada Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Bgl di Kabupaten Kaur, serta mengevaluasi efektivitas dokumen tersebut dalam pencegahan dan penindakan perdagangan kayu ilegal. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapak Lucky Selvano Marigo, S.H., dan Bapak Wahyu Satriyo, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta observasi proses penanganan perkara. Data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan analisis putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menghubungkan ketentuan norma hukum dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan sah hasil hutan memiliki kedudukan sentral sebagai alat bukti legalitas; ketiadaan dokumen ini menjadi dasar utama dalam dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18/2013. Namun efektivitas surat keterangan sah hasil hutan dalam aspek preventif masih terbatas akibat pemalsuan dokumen, lemahnya pengawasan lapangan, dan belum meratanya digitalisasi verifikasi. Di sisi represif, keberadaan surat keterangan sah hasil hutan memperkuat pembuktian di persidangan, tetapi kendala prosedural seperti koordinasi antar-lembaga dan kelangkaan saksi ahli memperlambat penanganan kasus. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan sistem digitalisasi surat keterangan sah hasil hutan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta sosialisasi intensif kepada masyarakat. Penegakan hukum kehutanan akan lebih efektif apabila surat keterangan sah hasil hutan tidak hanya diperlakukan sebagai persyaratan formal, melainkan sebagai bagian integral dari sinergi kebijakan dan praktik penegakan hukum.

Kata Kunci: Surat Keterangan Sah Hasil Hutan, Tindak Pidana Kehutanan, Illegal logging, Penegakan Hukum, Kabupaten Kaur.

ABSTRACT

THE RELEVANCE OF THE CERTIFICATE OF LEGAL FOREST PRODUCTS IN FORESTRY CRIME CASES (A STUDY OF DECISION NO. 201/Pid.Sus/2024/PN Bgl)

By:
Pep Triana

Law enforcement in the forestry sector plays a strategic role in safeguarding forest sustainability and combating illegal logging. One of the primary legal instruments ensuring the legitimacy of timber products is the Certificate of Legal Forest Products (CLFP), which is required for any party involved in the transportation, storage, or trade of timber. This study analyzes the relevance of the CLFP in forestry crime cases, with a particular focus on Decision No. 201/Pid.Sus/2024/PN.Bgl in Kaur Regency, and evaluates its effectiveness in both preventing and prosecuting illegal timber trade. This research employs a juridical-empirical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with Mr. Lucky Selvano Marigo, S.H., and Mr. Wahyu Satriyo, S.H., Public Prosecutors at the Bengkulu District Prosecutor's Office, as well as direct observation of case handling procedures. Secondary data were collected from literature reviews, relevant laws and regulations, and court decision analyses. Data were analyzed using descriptive-analytical techniques to connect legal norms with their implementation in practice. The findings indicate that the CLFP plays a crucial role as evidence of timber legality, and its absence often serves as the main basis for prosecution under Article 83 paragraph (1) letter b of Law No. 18 of 2013. However, its preventive function remains limited due to issues such as document falsification, weak field supervision, and the absence of an integrated digital verification system. In its repressive function, the CLFP significantly strengthens evidentiary value in court, although procedural obstacles, such as inter-agency coordination problems and the lack of expert witnesses, often hinder case resolution. This study recommends the development of a more robust digital verification system, the strengthening of law enforcement capacity, and broader public education to ensure that the CLFP becomes an integral component of effective forestry law enforcement.

Keywords: Certificate of Legal Forest Products, Forestry Crime, Illegal Logging, Law Enforcement, Kaur Regency

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Relevansi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Dalam Tindak Pidana Kehutanan” tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak. Oleh karena itu padakemungkinan ini tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga selesai, dan secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si, Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Yang selalu memberikan bimbingan akademik dan memberikan kepada penulis.
4. Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing, telah dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan inspirasi selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk mendukung penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan bekal pengetahuan selama kuliah.
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang selalu mendoakan, mendukung, dan mendorong penulis selama perjalanan akademiknya.

Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Bengkulu, 24 juli 2025

Pep Triana
2174201114

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN RISINALITAS.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Peneliti terdahulu	7

BAB II TINJAUAN / KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak pidana kehutanan	8
B. Surat keterangan sah hasil hutan.....	10
C. Penegakan hukum kehutanan	12

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian.....	16
B. Sumber data	16
C. Lokasi dan jadwal penelitian	18
D. Teknik pengumpulan data.....	19
E. Teknik analisis data.....	20

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kedudukan dan penerapan surat keterangan sah hasil hutan dalam kasus kepemilikan hasil hutan21
- B. Efektivitas surat keterangan sah hasil hutan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kehutanan berdasarkan putusan Nomor.201Pid.Sus/2024/PN.Bgl.....26

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan61
- B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjadi penopang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain berfungsi sebagai penyedia oksigen dan habitat bagi flora dan fauna, hutan juga memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama dalam industri hasil hutan seperti kayu. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kayu, praktik penebangan liar (illegal logging) semakin marak terjadi, termasuk di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Illegal logging tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, degradasi lahan, dan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.¹

Salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam mengendalikan peredaran hasil hutan kayu di Indonesia adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Surat keterangan sah hasil hutan merupakan dokumen resmi yang membuktikan legalitas kayu yang ditebang, diangkut, dan diperdagangkan. Keberadaan surat keterangan sah hasil hutan menjadi sangat penting dalam sistem pengelolaan hasil hutan guna memastikan bahwa kayu yang beredar di pasaran berasal dari sumber yang sah dan sesuai dengan

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Dampak Illegal Logging terhadap Lingkungan," diakses melalui www.menlhk.go.id.

ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), setiap kegiatan peredaran hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah.² Ketiadaan dokumen ini dapat menjadi indikasi bahwa kayu tersebut diperoleh secara ilegal dan berpotensi menimbulkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Di Kabupaten Kaur, maraknya praktik illegal logging menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wilayah ini mengalami deforestasi akibat meningkatnya aktivitas penebangan kayu tanpa izin resmi. Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa Kabupaten Kaur kehilangan ribuan hektare hutan setiap tahunnya akibat aktivitas illegal logging dan lemahnya pengawasan terhadap dokumen legalitas kayu.³ Surat keterangan sah hasil hutan seharusnya menjadi alat kontrol yang kuat dalam memastikan legalitas hasil hutan, tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi penyalahgunaan, pemalsuan, atau pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Putusan 201/Pid.Sus/2024/PN Bgl. Dalam kasus ini, seorang pelaku diamankan karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 12.

³ Data Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, "Tingkat Deforestasi di Kabupaten Kaur," 2023

yang sah. Meskipun tindak pidana terjadi di Kabupaten Kaur, persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkulu, yang kemungkinan besar disebabkan oleh faktor yurisdiksi hukum dan keterlibatan Polda Bengkulu dalam penyidikan kasus tersebut.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana ketiadaan surat keterangan sah hasil hutan dapat menjadi indikator kuat bahwa hasil hutan yang dimiliki atau diangkut berasal dari kegiatan illegal logging. Hal ini berdampak luas, tidak hanya merugikan negara dalam aspek ekonomi—karena pendapatan dari sektor kehutanan berkurang—tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan. Kabupaten Kaur sendiri mengalami penurunan luas hutan akibat pembalakan liar yang tidak terkendali, yang menimbulkan dampak seperti kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, serta meningkatnya risiko bencana alam.⁴

Selain dari aspek lingkungan, tantangan dalam penerapan surat keterangan sah hasil hutan juga muncul dalam aspek penegakan hukum. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait, lemahnya pengawasan di lapangan, serta adanya oknum yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan dokumen surat keterangan sah hasil hutan. Dalam banyak kasus, pelaku illegal logging dapat memalsukan dokumen, menggunakan surat keterangan sah hasil hutan yang tidak valid, atau mengangkut kayu tanpa surat keterangan sah hasil hutan untuk menghindari deteksi aparat hukum. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta penerapan

⁴ Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, “Kajian Dampak Kerusakan Hutan terhadap Ekosistem,” 2022.

sanksi yang berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan penerapan surat keterangan sah hasil hutan dalam tindak pidana kehutanan, khususnya dalam kasus di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Kasus ini juga menyoroti peran penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Bengkulu, dalam menangani perkara kepemilikan hasil hutan kayu tanpa dokumen yang sah. Pemindahan lokasi persidangan ke Pengadilan Negeri Bengkulu kemungkinan dilakukan karena yurisdiksi hukum, mengingat Polda Bengkulu yang menangani penyidikan kasus ini. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah praktik illegal logging di masa depan.

Kejaksaan Negeri Bengkulu melalui penanganan perkara dengan nomor putusan 201/Pid.SUS/2024/PN Bgl merupakan salah satu contoh nyata dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sah. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji, karena mencerminkan bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam melindungi sumber daya alam hutan, serta bagaimana aparat penegak hukum mengimplementasikan peraturan hukum yang berlaku dalam menangani tindak pidana kehutanan. Melalui studi ini, akan dilakukan secara mendalam proses penanganan kasus oleh kejaksaan Negeri Bengkulu, termasuk tantangan yang dihadapi serta dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam memahami dinamika penegakan hukum di sektor kehutanan dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik dimasa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan peneletian lebih lanjut, dengan judul: relevansi surat keterangan sah hasil hutan dalam kasus tindak pidana kehutanan (studi putusan 201/Pid.SUS/2024/PN Bgl)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan penerapan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dalam penanganan kasus kepemilikan hasil hutan kayu tanpa dokumen yang sah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu?
2. Efektivitas surat keterangan sah hasil hutan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kehutanan berdasarkan putusan nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bgl?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah peneliti jelaskan diatas, maka terdapat tujuan utama dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan ini mencakup upaya memahami apakah keberadaan atau ketiadaan surat keterangan sah hasil hutan berpengaruh langsung terhadap terpenuhinya unsur pidana, misalnya dalam kasus pembalakan liar atau pengangkutan hasil hutan tanpa izin.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan memberikan masukan atau solusi untuk memberikan masukan atau solusi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan surat keterangan sah hasil hutan sebagai alat pengawasan, dan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kehutanan berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Bgl. dan penegakan hukum.

D. Manfaat penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya mengenai relevansi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai alat pembuktian dalam kasus tindak pidana kehutanan, serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dibidang hukum lingkungan dan kehutanan.

2. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penegak hukum, seperti kejaksaan dan pengadilan, dalam menangani kasus tindak pidana kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan hasil hutan tanpa dokumen yang sah, sehingga mendukung pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan.

E. Peneliti terdahulu

Nama penulis	judul	Rumusan masalah	perbedaan
Trisna gamayanti ma'na	Tinjauan yuridis turut serta dalam tindak pidana mengangku	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil	Judul, tempat penelitian dan rumusan masalah yang
	t kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan	terhadap turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan pada putusan nomor:66/Pid.Sus/2017/P N. Gto	dibahas.
Malik al Ghani nasution	Analisis yuridis tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan	1. Bagaimana pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dalam putusan nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN. Pbr? 2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dalam putusan nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN. Pbr?	Judul, tempat yang akan diteliti dan rumusan masalah